

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah kajian penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang dapat diambil dari berbagai sumber ilmiah, baik skripsi, tesis, disertasi atau jurnal penelitian. Dalam penelitian ini penulis tidak menemukan penelitian judul yang sama seperti judul penelitian penulis yang akan dilakukan. Terkait dengan permasalahan yang akan dilakukan oleh penulis, penulis mengangkat penelitian terdahulu sebagai acuan adalah yang terkait dengan permasalahan kesejahteraan. Untuk itu berikut penelitian terdahulu yang menjadi acuan penulis dalam melakukan penelitian :

Priagung Luhur (2016) yang berjudul “Analisis Kesejahteraan Tenaga Kerja Outsourcing Dalam Perspektif Ekonomi Islam”. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif untuk mengetahui bagaimana kesejahteraan tenaga kerja outsourcing CV. Amara dalam perspektif Ekonomi Islam. Dalam penelitian ini menjelaskan usaha peningkatan kesejahteraan pekerja, yang dilakukan oleh suatu CV, kepada para karyawannya dapat dikatakan telah memenuhi standar kesejahteraan pekerja dalam perspektif Ekonomi Islam. Dimana CV. Amara telah memberikan upah yang layak kepada para karyawannya, selain upah ada bentuk kompensasi lain.

Penelitian berikutnya adalah tulisan dari Raden Dendy Yudha Prawira (2015), yang berjudul “Strategi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Buruh Di Kota Tangerang”. Penelitian ini memiliki tujuan strategi BPJS Ketenagakerjaan dalam meningkatkan kesejahteraan buruh. menunjukkan belum optimal cara yang dijalankan oleh BPJS Ketenagakerjaan Kota Tangerang disebabkan faktor internal dan eksternal.

Berikutnya adalah tulisan dari Ekml Lana Dina (2017), yang berjudul “Persepsi Pekerja Perempuan Terhadap Pemenuhan Hak Kesejahteraan Tenaga Kerja Melalui Program Kesejahteraan Oleh PT. Djarum”. Penelitian ini bersifat kualitatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa persepsi pekerja perempuan terhadap pemenuhan hak kesejahteraan tenaga kerja melalui program kesejahteraan oleh PT. Djarum dapat disadidapat dari tiga perspektif yaitu 1. mengenai kesejahteraan pekerja secara luas. karena apa yang mereka dapatkan sudah sesuai dengan yang diharapkan, 2. Tentang upah pekerja perempuan ditempatkan sesuai dengan yang diharapkan dan Tentang jaminan pekerja perempuan yang menunjukkan bahwa jaminan yang diberikan oleh perusahaan sudah sesuai dengan yang diharapkan dan cenderung mengalami kenaikan ke arah yang lebih baik.

Berikutnya adalah tulisan dari Yusni Marganet dan Irsyad Lubis. Yang berjudul Peranan Kredit Koperasi Rumondang Terhadap Kesejahteraan PT Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk Cabang Medan, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Vol. 1 No 6, Juni 2013. Berdasarkan penelitian menampilkan bahwa banyak karyawan Bank Rakyat Indonesia. Pinjaman koperasi karyawan kepada anggota dengan suku bunga rendah dapat menambah kesejahteraan anggota dengan suku bunga rendah dapat meningkatkan kesejahteraan anggota karena anggota dapat memenuhi kebutuhan lainnya.

Tabel 1 : Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Judul Penelitian	Hasil atau Temuan Penelitian	Hasil Relevansi Penelitian
1	Priagung Luhur, Analisis Kesejahteraan Tenaga Kerja (Outsourcing) Dalam Perspektif Ekonomi Islam.	Dalam penelitian ini menjelaskan usaha peningkatan kesejahteraan pekerja, yang dilakukan oleh suatu CV, kepada para karyawannya dapat dikatakan telah	Relevansi penelitian sebelumnya dengan yang ditulis peneliti yaitu mempunyai kesamaan dalam konteks tentang kesejahteraan pekerja. bedanya dari penelitian yang akan dilakukan

		memenuhi standar kesejahteraan pekerja dalam perspektif Ekonomi Islam. Dimana CV. Amara telah memberikan upah yang layak kepada para karyawannya, selain upah ada bentuk kompensasi lain.	adalah perbedaannya dari penelitian ini subjek yang diteliti hanya untuk kesejahteraan karyawan Outsourcing. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah program BPJS untuk kesejahteraan semua masyarakat pekerja.
2	Raden Dendy Yudha Prawira, Strategi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Buruh Di Kota Tangerang, Skripsi Mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Tahun 2015.	Dari hasil temuan menunjukkan bahwasannya belum tercapainya strategi yang dijalankan oleh BPJS Ketenagakerjaan Kota Tangerang disebabkan adanya beberapa faktor internal dan eksternal.	Berikutnya terdapat relevansi dalam penelitian sebelumnya, yaitu membahas sama mengenai bedanya dari penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian sebelumnya membahas mengenai strategi BPJS Ketenagakerjaan. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah Program BPJS Ketenagakerjaan untuk kesejahteraan masyarakat pekerja.
3	Eknil Lana Dina, Persepsi Pekerja Perempuan Terhadap Pemenuhan Hak Kesejahteraan Tenaga Kerja Melalui Program Kesejahteraan Oleh PT. Djarum, Skripsi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, Tahun 2017.	Hasil penelitian ini menemukan bahwa persepsi pekerja perempuan terhadap pemenuhan hak kesejahteraan tenaga kerja melalui program kesejahteraan oleh PT. Djarum dapat dilihat dari tiga paradigma yaitu 1. Adanya kesejahteraan terhadap buruh, secara umum. 2. gaji pekerja perempuan ditempatkan sudah sesuai dengan yang diharapkan 3. Kemudian, jaminan memperlihatkan yang diberikan oleh suatu perusahaan beserta dengan yang diharapkan.	Persamaan penelitian sebelumnya beserta penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membicarakan tentang kesejahteraan pekerja. Perbedaannya dari penelitian sebelumnya adalah program untuk kesejahteraan tenaga kerja melalui program PT. Djarum, sedangkan penelitian yang akan dilakukan melalui program BPJS Ketenagakerjaan.

4	Yusni Marganet dan Irsyad Lubis. Guna dari Kredit Koperasi Rumondang Terhadap Kesejahteraan PT Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk.	Berdasarkan penelitian memperlihatkan adanya banyaknya karyawan Bank Rakyat Indonesia. Pinjaman koperasi karyawan kepada anggota dengan suku bunga rendah dapat meningkatkan kesejahteraan anggota dengan suku bunga rendah dapat meningkatkan kesejahteraan anggota karena anggota dapat memenuhi kebutuhan lainnya.	Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas tentang kesejahteraan. Untuk perbedaannya sendiri adalah penelitian terdahulu membahas kesejahteraan rumandang kepada PT. BRI, sedangkan yang akan dilakukan adalah peneliti ingin mengetahui program BPJS Ketenagakerjaan untuk kesejahteraan masyarakat pekerja.
---	---	---	--

B. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah badan hukum yang dibentuk dengan Undang-Undang untuk menyelenggarakan program jaminan sosial (Sulastomo, 2008:78). BPJS merupakan badan hukum publik karena memenuhi ketiga persyaratan seperti terjadinya badan hukum diadakan dengan konstruksi hukum publik, lingkungan kerjanya dan wewenang.

Pada umumnya, program jaminan sosial memberikan dua manfaat utama. Peranannya yang pokok ialah untuk mencapai tujuan sosial dengan memberikan ketenangan kerja bagi buruh atau karyawan yang merupakan pelaksana pembangunan melalui perlindungan terhadap terganggunya arus penerimaan penghasilan. Dalam program jaminan sosial biasanya akan terpupuk suatu cadangan finansial yang pada tahun-tahun permulaan akan semakin besar, yang disebabkan :

1. Pembayaran jaminan dalam jumlah besar biasanya bisa terjadi beberapa puluh tahun setelah terbentuknya program jaminan sosial.

2. Industri berkembang dan meningkatkan kepesertaan dengan bertambahnya jumlah pabrik yang wajib mengikut sertakan pekerjaanya pada program tersebut.
3. Penduduk yang berusia muda cenderung seperti di negara berkembang ,yang memberikan peserta muda yang lebih banyak dari pada mereka yang akan berhak untuk menerima jaminan (Kertonegoro, 1982: 215-216).

Sebagai pelayanan publik, jaminan sosial merupakan perangkat negara yang didesain untuk menjamin bahwa setiap orang sekurang-kurangnya memiliki pendapatan minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasarnya (Su'adah, dkk, 2007:21).

Tiga kriteria di bawah ini digunakan untuk menentukan bahwa BPJS merupakan baadan hukum publik, yaitu:

1. Cara pendirian badan hukum itu, dilaksanakan oleh konstruksi hukum publik, dan didirikan oleh Negara.
2. Area kerja, melakukan tugasn pada umumnya yang bertindak kepada kedudukan yang sama dengan public.
3. Wewenang, badan hukum tersebut dibangun oleh Undang-Undang dan diberi wewenang untuk membuat ketetapan, peraturan yang mengikat umum.

Penyelenggara Jaminan Sosial adalah hukum publik karena mmencukupi tiga persyaratan tersebut. yang tercantum dalam berbagai norma dalam Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yaitu:

1. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dibentuk dengan UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
2. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial mempunyai fungsi untuk menyelenggarakan kepentingan umum, yaitu Sisyem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang

berdasarkan asas keadilan sosial, kemanusiaan dan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia.

3. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial diberi delegasi kewenangan untuk membuat aturan yang mengikat umum.
4. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial mempunyai tugas untuk mengatur ana public..
5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial mempunyai wewenang dalam menjalankan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan peserta dan pengusaha dalam memenuhi kewajibann sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang jaminan sosial nasional.
6. Badan Penyelenggara Jamina bertindak mewakili Negara Republik Indonesia sebagai lembaga internasioanl atau organisasi.
7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial mempunyai wewenang sanksi administrasi peserta BPJS jika kewajiban tidak memenuhi.
8. Proses seleksi punlik setelah melalui pengangkatan anggota dewan pengawas oleh presiden.

C. Tenaga Kerja

Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (Simanjuntak, 2003:12). Di Indonesia, tenaga kerja mencakup penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan dan yang melakukan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga.

Konsep tenaga kerja di tiap negara berbeda-beda. Tenaga kerja juga didefinisikan sebagai penduduk berumur 15 tahun atau lebih. Istilah tenaga kerja digunakan, baik di luar maupun di dalam hubungan kerja, sedangkan pekerja khusus di

dalam hubungan kerja. Berarti setiap pekerja sudah pasti tenaga kerja, tetapi setiap tenaga kerja belum tentu pekerja (Khamim, 2003:3).

Sebagai tujuan pembangunan, tenaga kerja perlu memperoleh perlindungan dalam semua aspek termasuk perlindungan atas keselamatan dan kesehatan pekerja, serta perlindungan upah dan jaminan sosial sehingga menjamin rasa aman, tentram, terpenuhinya keadilan, serta terwujudnya kehidupan yang sejahtera lahir dan batin, selaras, serasi dan seimbang. Tenaga kerja merupakan modal utama serta pelaksanaan dari pada pembangunan masyarakat tersebut adalah kesejahteraan rakyat termasuk tenaga kerja. Bagi tenaga kerja jaminan sosial sangat dibutuhkan karena itu dapat menjamin keselamatan para tenaga kerja. Karena apabila tanpa adanya suatu jaminan sosial diluar upah yang selama ini mereka dapatkan maka secara tidak langsung berpengaruh terhadap perlindungan para tenaga kerja.

Hak-hak tenaga kerja didalam Undang-undang No. 14 Tahun 1969 adalah :

1. setiap pekerja mempunyai hak atas penghasilan yang pantas bagi kemanusiaan.
Salah satu tujuan dari masyarakat Pancasila adalah memberikan kesempatan bagi tiap tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang memberikan kesejahteraan.
2. Setiap pekerja berhak pindah pekerjaan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.
Tenaga kerja juga ingin melakukan dengan baik mengharapkan kepuasan, serta berawal dari sebuah pelaksanaan pekerjaan yang disukai.
3. Setiap pekerja mempunyai hak atas pembinaan skill, kejujuran guna menapatkan keahlian dan ketrampilan kerja untuk menghasilkan potensi, kreasi, serta dapat mengembangkan rangka meningkatkan kecerdasan untuk menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari pembinaan bangsa.

4. Tiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatan, kesehatan, kesusilaan, pemeliharaan moril kerja serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama.
5. Tiap tenaga kerja berhak mendirikan dan menjadi anggota perserikatan tenaga kerja (Manulang, 1987:7-8).

Undang-undang No. 14 tahun 1969 tentang ketentuan pokok mengenai tenaga kerja ini adalah merupakan undang-undang pokok di bidang ketenagakerjaan, yang merumuskan pokok-pokok untuk menjamin kedudukan sosial ekonomi tenaga kerja serta arah yang harus ditempuh dalam mengatur kebutuhan sosial ekonomi tenaga kerja dengan cita-cita dan aspirasi bangsa Indonesia.

D. Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan berasal dari kata “sejahtera”. Sejahtera mengandung pengertian dari bahasa Sansekerta “catera” yang mempunyai arti payung. Dalam konteks ini, kesejahteraan yang terkandung dalam arti “catera” (payung) adalah orang yang sejahtera yaitu orang yang dalam hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman tenteram, baik lahir maupun batin. Sedangkan sosial berasal dari kata “Socius” yang berarti kawan, teman, dan kerja sama (Fahrudin, 2012:8).

Kesejahteraan sosial mempunyai beberapa makna yang relatif berbeda, meskipun substansinya tetap sama. Kesejahteraan sosial pada intinya mencakup tiga konsepsi, yaitu :

1. Terpenuhinya kebutuhan jasmani, rohani dan sosial
2. Institusi, arena atau bidang kegiatan yang melibatkan lembaga kesejahteraan sosial dan berbagai profesi kemanusiaan yang menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial dan pelayanan sosial.

3. Aktivitas suatu kegiatan akan terorganisir jika mencapai kondisi yang sejahtera (Suharto, 2014:2).

E. Landasan Teori

a. Teori Amitai Etzioni

Menurut Amitai Etzioni tentang Model Tujuan dan Model Sistem dengan menggunakan suatu model sistem akan mudah diketahui distorsi pokok yang terdapat di dalam analisa organisasi yang tidak dapat dilihat atau dijelaskan menurut perpektif evaluasi model-tujuan. Sistem pendekatan model-tujuan ini mengharapkan agar efektivitas organisasi dapat ditingkatkan dengan cara memberikan lebih banyak sarana untuk mencapai tujuan organisasi. Dihak lain menurut perpektif model tujuan pada hakekatnya merupakan suatu kontradiksi. Walaupun demikian dengan model sistem akan mudah ditarik kesimpulan bahwa apabila jumlah sumber daya yang dialokasikan untuk mencapai tujuan kadang-kadang terlalu sedikit, pada saat tertentu alokasi sumber daya itu malah berlebihan (Etzioni, 1982:25).

Secara eksplisit model sistem mengakui bahwa organisasi dapat memecahkan beberapa problem lain kecuali yang secara langsung terlibat didalam usaha pencapaian suatu tujuan, demikian pula apabila terlalu ditekankan kepada masalah pencapaian tujuan maka akibatnya perhatian kurang diarahkan kepada kegiatan lain yang diperlukan dan kurangnya koordinasi antara berbagai kegiatan yang terlalu banyak untuk mencapai tujuan dan kegiatan lain yang tidak dijuruskan khusus untuk mengejar tujuan.

Sebagaimana diketahui teori organisasi yang telah dikembangkan secara mantap mencakup pernyataan mengenai beberapa persyaratan fungsional yang harus diketahui tipe organisasi. Sebagaimana manusia mempunyai kebutuhan yang

beraneka ragam, demikian pula organisasi memerlukan berbagai sarana agar dapat beroperasi secara sukses. Kesadaran terhadap kebutuhan tersebut akan menjadi pedoman bagi peneliti yang sedang menyusun suatu model sistem yang dapat diterapkan untuk menyelidiki suatu organisasi (Etzioni: 1982:26).

Jika dihubungkan dengan Model Tujuan dan Model Sistem yang sedang di analisis ini, model tujuan dan model sistem BPJS Ketenagakerjaan dalam konsep berfikir Amitai Etzioni yang perlu ditekankan yaitu Model Tujuan BPJS Ketenagakerjaan adalah untuk melindungi masyarakat pekerja atau yang biasa disebut karyawan atau pegawai untuk meringankan beban keluarga dalam bentuk biaya pemakaman, uang santunan, untuk menjamin pekerja saat terkena PHK maupun kecelakaan kerja seperti cacat total tetap maupun kecelakaan kerja yang ringan dengan Model sistem dari Program BPJS Ketenagakerjaan seperti menggunakan program Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kemantian.

Kesejahteraan masyarakat pekerja melalui program dari BPJS Ketenagakerjaan tersebut maka peneliti menggunakan Teori Model Tujuan dan Model Sistem menjelaskan suatu kompleks apa tujuan dari program dari BPJS Ketenagakerjaan untuk mensejahterahkan masyarakat pekerja untuk memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan oleh pekerja. Dimana teori model tujuan dan model sistem cocok untuk menjelaskan keterbelakangan manfaat dari program BPJS Ketenagakerjaan untuk memberi kebutuhan-kebutuhan pekerja yang terkena PHK, masalah kecelakaan kerja, biaya pemakaman, uang santunan.